KOLABORASI SATLINMAS DAN PECALANG DALAM PENYELENGGARAAN SIPANDUBERADAT DI KELURAHAN PEGUYANGAN KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

Agung Mirah Prayoga
NPP. 33.0514
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: mirahprayoga@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si
Email: florianusaser@ipdn.ac.id

ABSTRACT

***Research Problem (Research Gap)**: This study examines the suboptimal collaboration between the Community Protection Unit (Satlinmas) and Traditional Security Officers (Pecalang) in implementing the Integrated Community Security System Based on Traditional Villages (Sipanduberadat) in Peguyangan Village, Denpasar City. The issue is reflected in persistent disturbances to public peace, public order, and community protection (Trantibumlinmas), as well as communication and coordination challenges. Limited studies have specifically explored collaboration between governmental and customary institutions within Sipanduberadat. **Purpose:** This study aims to analyze the collaboration between Satlinmas and Pecalang in the implementation of Sipanduberadat in Peguyangan Village, Denpasar City. **Method:** A descriptive qualitative approach was employed using Ansell and Gash's Collaborative Governance Theory. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model with source and technique triangulation. **Results/Findings:** Collaboration was implemented through face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. These were reflected in coordination meetings, joint security activities, continuous cooperation, and a common goal of maintaining public order. However, collaboration remains constrained by limited communication, weak operational coordination, differing perceptions, and the absence of integrated operational procedures. **Conclusion:** The collaboration between Satlinmas and Pecalang in implementing Sipanduberadat has been carried out but has not yet reached an optimal level. Strengthening coordination, communication, and joint operational procedures is necessary to improve its effectiveness.*

***Keywords:** Collaboration, Pecalang, Public Order, Satlinmas, Sipanduberadat*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) di Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar. Kondisi tersebut ditandai dengan masih terjadinya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta adanya kendala komunikasi, koordinasi, dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun berbagai penelitian telah membahas kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji kolaborasi antara unsur pemerintah dan unsur adat dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kota Denpasar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dilaksanakan melalui lima dimensi Collaborative Governance. Pada dimensi dialog tatap muka, kedua pihak melaksanakan koordinasi melalui rapat dan komunikasi langsung dalam kegiatan pengamanan. Pada dimensi pembangunan kepercayaan, kolaborasi dibangun melalui keterlibatan bersama dalam menjaga keamanan wilayah. Pada dimensi komitmen terhadap proses, kedua pihak menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas. Pada dimensi pemahaman bersama, terdapat kesamaan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pada dimensi hasil antara (intermediate outcomes), kolaborasi menghasilkan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanganan gangguan Trantibumlinmas. Namun, implementasi kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan komunikasi, lemahnya koordinasi operasional, perbedaan persepsi, serta belum adanya prosedur operasional yang terintegrasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Disarankan agar mekanisme koordinasi dan komunikasi diperkuat serta disusun prosedur operasional bersama untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pecalang, Satlinmas, Sipanduberadat, Trantibumlinmas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Di Provinsi Bali, penyelenggaraan keamanan masyarakat melibatkan dua unsur utama, yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai unsur pemerintah dan Pecalang sebagai unsur keamanan adat. Sinergi kedua lembaga tersebut diperkuat melalui kebijakan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020.

Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah penduduk yang tinggi, yaitu 15.015 jiwa yang tersebar pada 13 banjar, sehingga memiliki dinamika sosial dan potensi gangguan Trantibumlinmas yang cukup kompleks. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 terjadi peningkatan berbagai gangguan ketertiban, seperti pelanggaran PKL, parkir liar, keributan, pencurian, dan peredaran minuman keras. Dalam tiga tahun terakhir tercatat 307 kasus gangguan ketertiban yang memerlukan penanganan oleh berbagai unsur keamanan di wilayah tersebut.

Meskipun Sipanduberadat telah menjadi wadah kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi operasional, keterbatasan komunikasi, serta belum adanya mekanisme kolaborasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara unsur pemerintah dan unsur adat dalam menjaga keamanan lingkungan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk kolaborasi Satlinmas dan Pecalang serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah banyak dilakukan dengan fokus pada peran Satlinmas, efektivitas Sipanduberadat, maupun implementasi sistem keamanan berbasis masyarakat. Penelitian Didi Setio Nugroho (2022) berfokus pada kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, sedangkan penelitian I Made Arjaya dkk. (2022) dan Wayan Sugianta dkk. (2022) lebih menitikberatkan pada implementasi dan efektivitas Sipanduberadat. Sementara itu, penelitian I Nyoman Tegar Arthadi (2025) telah membahas kolaborasi Satlinmas dan Pecalang, namun dilakukan pada wilayah desa dengan karakteristik sosial yang berbeda dari wilayah perkotaan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa terbatasnya kajian yang secara khusus membahas kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat pada

wilayah kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan dinamika sosial yang tinggi. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas program dan implementasi kebijakan, sedangkan pembahasan mengenai hambatan kolaborasi seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan persepsi tugas, lemahnya komunikasi, dan koordinasi operasional masih belum dikaji secara mendalam. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk diteliti karena Kelurahan Peguyangan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi serta mengalami berbagai gangguan Trantibumlinmas yang cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya sinergi yang efektif antara Satlinmas sebagai unsur pemerintah dan Pecalang sebagai unsur adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk kolaborasi dan hambatan kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash.

1.3 Urgensi Penelitian

Kelurahan Peguyangan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi dan dinamika sosial yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat 307 kasus gangguan Trantibumlinmas yang terdiri atas pelanggaran PKL, parkir liar, keributan, pencurian, peredaran minuman keras, dan berbagai bentuk gangguan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Di sisi lain, implementasi Sipanduberadat sebagai sistem pengamanan berbasis desa adat masih menghadapi berbagai kendala berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan persepsi tugas, lemahnya komunikasi, dan belum optimalnya koordinasi antara Satlinmas dan Pecalang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana bentuk kolaborasi yang telah terbangun serta hambatan yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kelurahan Peguyangan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Satlinmas dan Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Didi Setio Nugroho (2022) menemukan bahwa Satlinmas berkontribusi dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, namun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya. I Nyoman Tegar Arthadi (2025) mengungkap bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang telah berjalan, tetapi belum optimal akibat ketidakjelasan peran dan koordinasi. Sementara itu, I Made Arjaya dkk. (2022) serta Wayan Sugianta dkk. (2022) menyoroti implementasi Sipanduberadat yang masih terkendala pendanaan, sarana prasarana, dan koordinasi antar lembaga. Adapun Geraldo Rival Wokas (2022)

menekankan aspek pemberdayaan Satlinmas dalam meningkatkan keamanan lingkungan melalui partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara dalam proses kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan pada aspek teoritis melalui penggunaan perspektif collaborative governance serta pada aspek empiris melalui kajian kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam konteks penyelenggaraan Sipanduberadat di wilayah perkotaan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Dari aspek teori, penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007) untuk menganalisis kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang melalui indikator dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara (*intermediate outcomes*). Pendekatan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada kontribusi, pemberdayaan, implementasi program, maupun efektivitas kebijakan. Dari aspek kebijakan, penelitian ini secara khusus mengkaji penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) berdasarkan Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 dengan menitikberatkan pada sinergi antara unsur pemerintah dan unsur adat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas. Dari aspek karakteristik objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, dan kompleksitas gangguan Trantibumlinmas yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang berlokasi di wilayah desa atau berfokus pada implementasi kebijakan secara umum. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang terbangun antara Satlinmas dan Pecalang, tetapi juga menganalisis hambatan kolaborasi yang meliputi tumpang tindih kewenangan, perbedaan persepsi tugas dan fungsi, keterbatasan komunikasi, serta lemahnya koordinasi operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dalam memahami praktik kolaborasi antara kelembagaan formal dan kelembagaan adat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis kearifan lokal.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat di Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kolaborasi antara Pecalang dan Satlinmas dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) di Kelurahan Peguyangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, proses interaksi, serta hambatan yang dihadapi oleh para aktor yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan Sipanduberadat, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan Sipanduberadat. Informan terdiri atas Lurah Peguyangan, Bendesa Adat Peguyangan, Kasatlinmas, anggota Pecalang, anggota Satlinmas, Babinkamtibmas, dan Babinsa.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mendukung proses analisis, peneliti menggunakan aplikasi NVivo 15 sebagai alat bantu dalam melakukan pengkodean, pengelompokan, dan visualisasi data sehingga hasil analisis menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007) yang terdiri atas lima indikator, yaitu dialog tatap muka, Pembangunan, komitmen terhadap proses pemahaman bersama dan hasil antara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Analisis dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang terdiri atas dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang telah berlangsung dalam berbagai kegiatan pengamanan lingkungan, seperti patroli bersama, pengamanan kegiatan pemerintahan dan adat, penjagaan lingkungan, penanganan gangguan ketertiban umum, serta pelaksanaan program Sipanduberadat. Bentuk kerja sama tersebut mencerminkan sinergi antara sistem keamanan formal yang diwakili Satlinmas dengan sistem keamanan berbasis adat yang dijalankan oleh Pecalang.

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam Sipanduberadat

Dimensi Collaborative Governance	Temuan Penelitian	Indikator
Dialog Tatap Muka	Koordinasi dilakukan melalui rapat dan briefing sebelum kegiatan pengamanan	Pertemuan bersifat insidental, melibatkan Satlinmas, Pecalang, dan pihak kelurahan
Membangun Kepercayaan	Informasi kejadian dan jadwal patroli dibagikan kepada kedua pihak	Komunikasi melalui WhatsApp, HT, dan komunikasi langsung
Komitmen pada Proses	Pembagian peran telah dipahami dan dijalankan sesuai fungsi masing-masing	Satlinmas fokus pada pengamanan umum, Pecalang pada pengamanan adat
Pemahaman Bersama	Kedua pihak memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan lingkungan	Penyamaan persepsi dilakukan melalui rapat dan koordinasi lapangan
Hasil Sementara	Terjadi peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat	Respons pengamanan lebih cepat dan kegiatan adat tertib.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1.2
Hambatan Kolaborasi Satlinmas dan Pecalang

Dimensi Hambatan	Kondisi yang Ditemukan	Dampak
Komunikasi Langsung	Pertemuan belum terjadwal secara rutin	Informasi tidak selalu tersampaikan secara merata
Kepercayaan Antar Lembaga	Masih terjadi overlap informasi dan perintah ganda	Kebingungan anggota dan tumpang tindih tugas
Komitmen Institusional	Belum terdapat SOP khusus yang mengatur kolaborasi	Pelaksanaan bergantung pada inisiatif masing-masing pihak
Perbedaan Sudut Pandang	Perbedaan pendekatan formal dan adat	Perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas
Evaluasi dan Hasil Kolaborasi	Evaluasi masih dilakukan secara lisan	Perbaikan program belum terdokumentasi dengan baik

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1.3
Implementasi Kolaborasi Satlinmas dan Pecalang

Bentuk Kegiatan	Peran Satlinmas	Peran Pecalang
Patroli Lingkungan	Menjaga ketertiban umum	Membantu pengawasan berbasis adat
Pengamanan Kegiatan Adat	Mendukung pengamanan dan ketertiban	Menjadi pengamanan utama kegiatan adat
Pengamanan Acara	Pengamanan lokasi dan	Mendukung pengamanan

Pemerintahan	peserta kegiatan	wilayah adat
Penanganan Gangguan Trantibumlinmas Sipanduberadat	Penanganan awal dan koordinasi Melaksanakan pengamanan terpadu	Pendekatan sosial dan adat kepada masyarakat Menjalankan fungsi keamanan berbasis kearifan lokal

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.1. Dialog Tatap Muka

Pada dimensi dialog tatap muka, koordinasi antara Satlinmas dan Pecalang dilaksanakan melalui rapat koordinasi, briefing lapangan, serta komunikasi langsung yang umumnya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengamanan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi kedua pihak untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, membahas potensi gangguan yang mungkin terjadi, serta melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Melalui dialog tatap muka, hubungan kerja antara Satlinmas dan Pecalang dapat terjalin dengan lebih baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pengamanan di lapangan. Namun, pertemuan tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, melainkan masih bersifat insidental sesuai kebutuhan kegiatan. Kondisi ini menyebabkan proses penyampaian informasi dan hasil koordinasi belum selalu diterima secara merata oleh seluruh anggota, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Meskipun demikian, komunikasi langsung yang terjalin tetap berperan penting dalam mendukung kolaborasi kedua lembaga dalam penyelenggaraan Sipanduberadat.

3.2. Membangun Kepercayaan

Pada dimensi membangun kepercayaan, transparansi informasi antara Satlinmas dan Pecalang telah diupayakan melalui berbagai media komunikasi, seperti komunikasi langsung saat pelaksanaan tugas, grup WhatsApp, serta penggunaan alat komunikasi lapangan. Informasi yang berkaitan dengan jadwal patroli, rencana kegiatan pengamanan, pembagian tugas, serta kejadian atau potensi gangguan keamanan di lapangan umumnya dibagikan kepada kedua pihak. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan bagi Satlinmas dan Pecalang untuk memahami kondisi lapangan secara bersama-sama, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan mendukung terbentuknya rasa saling percaya dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, keterlibatan kedua lembaga dalam berbagai kegiatan pengamanan juga memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan keyakinan bahwa masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.Meskipun demikian, transparansi informasi yang telah terbangun masih menghadapi beberapa kendala. Hasil evaluasi kegiatan, laporan pelaksanaan tugas, maupun temuan-temuan penting di lapangan masih lebih banyak disampaikan secara lisan dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk laporan bersama. Kondisi ini menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu tersimpan dengan baik dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antaranggota, terutama bagi personel yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan

tertentu. Selain itu, ketiadaan dokumentasi yang terstruktur juga menyulitkan proses evaluasi dan pembelajaran bersama untuk kegiatan pengamanan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dokumentasi dan pelaporan yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pertukaran informasi serta memperkuat kepercayaan antar lembaga dalam penyelenggaraan Sipanduberadat.

3.3. Komitmen Terhadap Proses

Pada dimensi komitmen terhadap proses, penelitian menemukan bahwa kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang didasarkan pada aturan formal dan ketentuan adat yang berlaku, serta diperkuat melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam rapat koordinasi maupun komunikasi langsung di lapangan. Satlinmas menjalankan fungsi pengamanan umum, penertiban masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pecalang melaksanakan fungsi pengamanan berbasis adat dengan berpedoman pada nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam Desa Adat. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari kedua lembaga untuk saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyelenggaraan Sipanduberadat. Komitmen tersebut juga tercermin dari keterlibatan aktif Satlinmas dan Pecalang dalam berbagai kegiatan pengamanan, baik pada kegiatan kemasyarakatan, kegiatan adat, maupun penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kelurahan Peguyangan. Kedua lembaga berupaya menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap mengedepankan kerja sama dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Namun demikian, komitmen yang telah terbangun masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya didukung oleh instrumen kelembagaan yang lebih formal. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen kerja sama, nota kesepahaman, atau standar operasional prosedur bersama yang secara khusus mengatur pola hubungan, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta penyelesaian permasalahan antara Satlinmas dan Pecalang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen melalui penyusunan mekanisme kerja yang lebih terstruktur agar kolaborasi yang terjalin dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih efektif dalam mendukung penyelenggaraan Sipanduberadat.

3.4. Pemahaman Bersama

Penelitian menemukan bahwa Satlinmas dan Pecalang memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan utama kolaborasi, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kelurahan Peguyangan. Pemahaman tersebut dibangun melalui berbagai forum komunikasi, seperti rapat koordinasi, evaluasi kegiatan pengamanan, briefing lapangan, serta komunikasi yang dilakukan melalui masing-masing

pimpinan organisasi. Melalui proses tersebut, kedua lembaga dapat menyelaraskan tujuan, bertukar informasi, dan membangun kesepahaman mengenai peran masing-masing dalam penyelenggaraan Sipanduberadat. Kesamaan tujuan ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan secara bersama dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antara unsur pemerintah dan unsur adat.

Meskipun demikian, pemahaman bersama yang telah terbentuk belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian masih menemukan adanya perbedaan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama antara pendekatan formal yang diterapkan oleh Satlinmas dan pendekatan adat yang dijalankan oleh Pecalang. Satlinmas cenderung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi, dan mekanisme kedinasan, sedangkan Pecalang lebih mengedepankan nilai-nilai adat, norma sosial, serta kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat adat. Perbedaan pendekatan tersebut terkadang menimbulkan variasi dalam cara menangani suatu permasalahan, khususnya pada kasus-kasus yang berada di antara ranah hukum formal dan ranah adat. Selain itu, belum adanya pedoman kerja bersama yang mengatur secara rinci batas kewenangan dan mekanisme koordinasi menyebabkan potensi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan tugas masih dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelarasan yang lebih intensif melalui forum komunikasi, pelatihan bersama, dan penyusunan mekanisme kerja yang terintegrasi guna memperkuat pemahaman bersama dalam penyelenggaraan Sipanduberadat.

3.5. Hasil Sementara

Kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang telah memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan. Masyarakat memberikan respons yang baik terhadap kerja sama yang terjalin karena dinilai mampu meningkatkan rasa aman, mempercepat respons terhadap potensi maupun kejadian gangguan keamanan, serta menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan adat, keagamaan, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kehadiran kedua lembaga secara bersamaan dalam berbagai kegiatan pengamanan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat dan unsur adat dalam menjaga stabilitas lingkungan. Selain itu, koordinasi yang dilakukan telah membantu meminimalkan potensi konflik dan memperlancar pelaksanaan berbagai agenda masyarakat yang membutuhkan pengamanan bersama. Hasil kolaborasi tersebut juga terlihat dari meningkatnya efektivitas pengawasan wilayah serta terbangunnya hubungan kerja yang lebih baik antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjalankan tugas masing-masing. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi dibandingkan sebelumnya. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis menggunakan aplikasi NVivo yang menunjukkan dominasi kata-kata seperti Satlinmas, Pecalang, koordinasi, lapangan, dan informasi. Dominasi kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa aspek koordinasi, pertukaran informasi, dan

keterlibatan kedua lembaga menjadi unsur yang paling menonjol dalam proses kolaborasi. Dengan demikian, hasil antara yang telah dicapai menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyelenggaraan Sipanduberadat, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi secara berkelanjutan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipanduberadat di Kelurahan Peguyangan telah berjalan melalui koordinasi, pembagian tugas, komunikasi, dan pengamanan bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan faktor utama keberhasilan kolaborasi antaraktor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini juga memperkuat teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007), khususnya pada dimensi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Kepercayaan antaraktor dibangun melalui transparansi informasi, komunikasi langsung, serta kerja sama dalam berbagai kegiatan pengamanan.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan adanya konflik kewenangan antara lembaga formal dan adat, penelitian ini menunjukkan bahwa Satlinmas dan Pecalang memiliki hubungan yang saling melengkapi sesuai fungsi masing-masing. Satlinmas berfokus pada ketertiban umum, sedangkan Pecalang menjalankan pengamanan berbasis adat sehingga tercipta sinergi yang mendukung efektivitas Sipanduberadat. Temuan penelitian ini juga memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan adanya integrasi sistem keamanan formal dan adat dalam satu mekanisme pengamanan lingkungan terpadu. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa komunikasi yang belum optimal, overlap informasi, belum adanya SOP khusus, perbedaan sudut pandang, dan evaluasi yang belum terstruktur. Hambatan tersebut memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa perbedaan budaya organisasi dan lemahnya koordinasi formal menjadi tantangan dalam kolaborasi antar lembaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam menjaga keamanan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi baru berupa gambaran empiris implementasi Sipanduberadat sebagai model kolaborasi keamanan berbasis kearifan lokal di Bali.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan adanya temuan menarik yang muncul selama proses penelitian, yaitu pengaruh keberadaan dua sistem kelembagaan yang berjalan berdampingan di Kelurahan Peguyangan, yakni kelembagaan pemerintahan melalui Satlinmas dan kelembagaan adat melalui Pecalang. Keberadaan kedua lembaga tersebut

pada dasarnya menjadi kekuatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat karena masing-masing memiliki legitimasi yang berbeda. Satlinmas memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah, sedangkan Pecalang memperoleh legitimasi dari norma adat dan kepercayaan masyarakat adat setempat. Di sisi lain, keberadaan dua sistem kelembagaan tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Sipanduberadat. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga, terutama ketika menghadapi permasalahan yang melibatkan unsur adat sekaligus unsur kedinasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih cepat menerima penyelesaian masalah yang dilakukan melalui pendekatan adat karena adanya kedekatan sosial dan ikatan budaya antara Pecalang dengan masyarakat. Namun demikian, untuk kasus-kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum positif, peran Satlinmas dan aparat penegak hukum tetap diperlukan guna menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, keberhasilan Sipanduberadat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga oleh kemampuan keduanya dalam memadukan pendekatan formal dan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa model pengamanan lingkungan yang diterapkan di Kelurahan Peguyangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena memadukan unsur pemerintahan dan unsur adat secara bersamaan. Kondisi ini menjadi potensi besar dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan, selama didukung oleh koordinasi yang intensif, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) di Kelurahan Peguyangan telah berjalan melalui dimensi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara (intermediate outcomes). Kolaborasi tersebut mendukung pelaksanaan pengamanan dan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan komunikasi, lemahnya koordinasi operasional, perbedaan persepsi mengenai tugas dan kewenangan, serta belum adanya prosedur operasional yang terintegrasi. Selain itu, ditemukan adanya dualisme kelembagaan antara sistem pemerintahan dan sistem adat yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan Sipanduberadat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada satu lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Peguyangan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada pelaksanaan Sipanduberadat di wilayah lain. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kolaborasi dibandingkan pengukuran kuantitatif tingkat efektivitas kolaborasi.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)*: Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas lokus penelitian pada desa adat atau kelurahan lain yang menerapkan Sipanduberadat untuk memperoleh perbandingan model kolaborasi yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji pengaruh dualisme kelembagaan terhadap efektivitas kolaborasi, mengukur tingkat keberhasilan Sipanduberadat secara kuantitatif, serta mengeksplorasi peran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam memperkuat sinergi antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing, keluarga, informan penelitian, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Creswell, John W Creswell, J David. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2018.

Eviany, Eva, and Sutiyo. Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan. Jawa Barat: PT. Nas Media Indonesia, 2023.

Ismail, Wekke. Metode Penelitian Sosial. CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

Jabar, Lalu Abdul. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Indonesia: Bookies Indonesia, 2022.

Mattessich, P. W., & Monsey, B. R. (1992). *Collaboration: What makes it work: A review of research literature on factors influencing successful collaboration*. Amherst H. Wilder Foundation.

Naamy, H Nazar, and M Si. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya, 2019.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2019). Collaborative governance dalam pelayanan publik. IPDN Press.

Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. AGMA, 2023.

Saragih, M. G., Rahayu, S., & Mesra, B. (2022). *Manajemen pariwisata*. CV Tungga Esti.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2023.

Wasistiono, S. (2013). Perkembangan organisasi kecamatan dari masa ke masa. Fokusmedia.

Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2009). Metodologi ilmu pemerintahan. IPDN Press.

Wasistiono, S., Rohmadin, S., dkk. (2025). Empat pilar ilmu pemerintahan. IPDN Press.

Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 2014.

JURNAL

Ansell, Chris, and Alison Gash. *"Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–71. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Auzzir, Z., Haigh, R., & Amaratunga, D. (2018). I*mpacts of Disaster to SMEs in Malaysia. Procedia Engineering*, 212, 1131–1138. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.146

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations.* Public Administration Review, 66, 44–55. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x

Bungin, Burhan. Post-Qualitative Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods, 2022.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). *Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other?* International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41–69. https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105

Creswell, John W Creswell, J David. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2018.

Eviany, Eva, and Sutiyo. Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan. Jawa Barat: PT. Nas Media Indonesia, 2023.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Imperial, M. T. (2005).Using Collaboration as a Governance Strategy. Administration & Society, 37(3), 281–320. https://doi.org/10.1177/0095399705276111

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2019). Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik. Jakarta: IPDN Press.

Rauf, R. (2020). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurnal Ilmiah Kependidikan, III(April), 221–232.

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Zanafa Publishing.

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2023.

Sumada, I.M., dkk. (2024). Desa Mawacara: Keberagaman Fungsi Desa Adat di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Sutiyo. (2021). Manajemen Bencana dan Pemerintahan Daerah. Sumedang: IPDN Press.

Thomson, Ann Marie, James L. Perry, and Theodore K. Miller. "Conceptualizing and Measuring Collaboration." Journal of Public Administration Research and Theory 19, no. 1 (2009): 23–56. https://doi.org/10.1093/jopart/mum036.